

Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Emboke) Sebagai Upaya Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Cirebon

Ilham Bustomi^{1*}, Akhmad Shodikin²

IAN Syekh Nurjati Cirebon

Email: ¹ilhambustomi@syekhnurjati.ac.id, ²akhmad_shodikin@syekhnurjati.ac.id

*Korespondensi

Abstarct

This research seeks to focus on the strategies implemented by the Cirebon City Regional Government in the "Wadul Bae" program in reducing the level of sexual violence against children in Cirebon City. The research method used is descriptive qualitative research by applying an empirical approach to a phenomenon related to the protection of children's basic rights and social activities in the Cirebon City Regional Government through observation, interviews and documentation techniques. The results of the research are the strategies of the Cirebon City Regional Government in reducing the level of sexual violence through the Wadul Bae Program, divided into several classifications, namely planning, implementation and evaluation which will be explained as follows; 1). Carrying out Research for Two Years for Wadul Bae Program Planning, 2). Grouping Target Audiences for Program Promotion Wadul Bae, 3). Creating a Wadul Bae Cadre Team, 4). Implementing Socialization Strategy, 5). Implementation of Wadul Bae Socialization Activities, 6). Evaluation Activities of the Wadul Bae Program. In creating a social marketing strategy, Wadul Bae collaborated with several communities in each RT and RW in Cirebon City, as well as the PPT at Gunung Jati Regional Hospital, Cirebon Police, Schools, Community Health Centers, and several institutions such as Rumah Zakat, Zakat Center, and Baznas Cirebon City and also Media to work together in reducing the problem of violence against women and children in Cirebon City.

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk berfokus kepada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam program "Wadul Bae" dalam menekan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan empiris terhadap suatu fenomena terkait perlindungan hak dasar anak dan aktivitas sosial di Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian adalah strategi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menekan tingkat kekerasan seksual melalui Program Wadul Bae, dibagi ke beberapa klasifikasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang akan dipaparkan sebagai berikut; 1). Melaksanakan Riset Selama Dua Tahun Untuk Perencanaan Program Wadul Bae, 2). Mengelompokkan Khalayak Sasaran Untuk Promosi Program Wadul Bae, 3). Membuat Tim Kader Wadul Bae, 4). Mengimplementasikan Strategi Sosialisasi, 5). Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Wadul Bae, 6). Kegiatan Evaluasi Pada Program Wadul Bae. Dalam membuat strategi pemasaran sosial Wadul Bae menggandeng beberapa masyarakat di tiap tiap RT dan RW di Kota Cirebon, juga pihak PPT RSUD Gunung Jati, Polresta Cirebon, Sekolah, Puskesmas, dan beberapa lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon dan juga Media untuk bekerja sama dalam mengurangi permasalahan kekerasan baik pada perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Kata Kunci: Kota Layak Anak, Kekerasan, Wadul Bae.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Untuk itu posisi anak yang strategis ini diperlukan pembinaan dan pengembangan secara terarah, terpadu dan menyeluruh yang pada hakekatnya adalah menjadi tanggung jawab semua pihak. Semua anak adalah aset bangsa. Itulah ungkapan yang bermula dari pemikiran anak sebagai objek dan subjek yang padanya melekat atribut seperti tunas bangsa, generasi penerus, penerima tongkat estafet pembangunan, pemimpin masa depan dan sebagainya. Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah (*child abuse*), ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak. Melihat posisi anak yang begitu penting, maka upaya panjang peningkatan kualitas tumbuh kembang anak berarti pula peningkatan kualitas sumber daya manusia masa depan. Pemenuhan jaminan kesehatan, gizi dan pendidikan pada masa anak menentukan banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan, intelektualitas, prestasi dan produktivitas dikemudian hari pada masa remaja dan dewasa.

Indonesia termasuk negara yang menghadiri pertemuan dunia dan melakukan kesepakatan tentang anak (*World Summit Meeting on Children*) yang difasilitasi PBB tahun 1990. Dalam pertemuan itu, Indonesia setuju melakukan deklarasi dan melangkah lebih jauh lagi dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36 tahun 1996 untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Ratifikasi telah mengikat negara baik ke dalam maupun keluar untuk secara serius melaksanakan isi KHA. Terdapat 4 hak utama anak yang tercantum dalam KHA, yaitu hak kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development*) hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation*).

Apabila mengkaji berbagai produk peraturan dan Undang-undang yang terkait dengan anak, kategori usia anak nampak masih bersifat sektoral (terdapat perbedaan) dengan sudut pandang kepentingan yang berbeda pula. Dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa Anak adalah seseorang adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun batasan usia anak yang tertuang dalam UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa

‘anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun’. Pada usia tersebut (0-14 tahun), anak masih rentan dan memerlukan terpenuhinya jaminan kebutuhan dasar (*basic need*) yaitu kebutuhan fa’ali (pangan dan gizi), kebutuhan akan rasa aman dan keamanan, kasih sayang orang dewasa dan pendidikan, yang jelas implikasinya terhadap perkembangan anak, baik fisik, intelektual dan stimulasi mental maupun perkembangan sosial-emosional. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar di atas, pertanda *sense of security* anak terancam dalam arti potensi issue sentral ‘*lost generation*’ menghadang di depan.

Kota Cirebon adalah kota berkembang yang sedang merintis menjadi Kota Pintar atau *Smart City* pada tahun 2018. Julukan Kota Wali ini telah menunjukkan Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas (Subiyakto, 2012). Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Setiap anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru semakin kompleks. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memproteksi masa depan anak (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014). Namun, permasalahan anak mencerminkan adanya penyalahgunaan, eksploitasi, diskriminasi dan masih banyak anak yang mengalami tindak kekerasan yang dapat membahayakan perkembangan jasmani, rohani serta sosialnya (Wismayanti, 2012). Di bidang pendidikan, angka putus sekolah mengalami trend kenaikan dengan alasan berbagai faktor (misalnya: kemiskinan), di bidang kesehatan ditemukan masih banyaknya anak dari keluarga miskin yang belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak disable dalam memperoleh pendidikan, serta maraknya kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitarnya seperti: orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya. Bahkan, aturan perlindungan sosial dan hukum masih menyisakan beragam kasus yang melibatkan anak dengan tingginya kasus anak yang bekerja di bawah umur, anak yang bermasalah dengan hukum serta kasus kekerasan seksual adalah kejahatan yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, terutama kesehatan psikologis dan mental seseorang.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun tidak memandang tua maupun muda. Tentunya isu kekerasan seksual sudah tidak asing lagi dalam deretan kasus kejahatan, khususnya di Indonesia. Kejahatan seksual yang mendominasi di Indonesia adalah kekerasan seksual pada

anak, yang semakin marak terjadi setiap tahunnya. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat kasus kekerasan seksual pada anak cukup tinggi dan memprihatinkan. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa masih banyak diskriminasi yang dialami oleh anak di negeri ini. Menurut data dari Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, pada *jabar.metrotvnews.com* dan *radarCirebon.com* menyatakan bahwa kasus kekerasan pada anak di Jawa Barat semakin lama kian memprihatinkan. Pasalnya, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, kasus kekerasan pada anak di Jawa Barat terus meningkat. Berdasarkan data yang dicatat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, terdapat 1.249 kasus terjadi dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat menjadi kasus yang dominan dan banyak memakan korban. P2TP2A Jawa Barat menerima laporan kasus dari tahun 2016-2017 sebanyak 346 kasus kekerasan seksual pada anak di Jawa Barat.

Perkembangannya dengan prestasi dan penghargaan yang telah diraih, salah satu prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) adalah mendapatkan penghargaan nasional sebagai Kota Layak Anak (KLA) tahun 2017. Penghargaan Kota Layak Anak tersebut hanya diberikan kepada 23 Provinsi, 126 Kota/Kabupaten di Indonesia, Kota Cirebon salah satunya yang mendapatkan penilaian sebesar 750 poin. Penghargaan Kota Layak Anak tingkat pratama pada 2017 yang diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise tanggal 22 Juli 2017 di Pekanbaru, Riau, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 penghargaan Kota Layak Anak Cirebon naik peringkatnya mejadi Madya.

Dengan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak yang mana hal tersebut sebagai salah satu bukti nyata keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang di bantu oleh elemen-elemen terkait, salah satu elemen yang mempunyai peranan besar adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (P2TP2A) Kota Cirebon dalam programnya yaitu Kader Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Mboke). Program yang telah di rintis sejak tahun 2005 hingga saat ini merupakan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terintegrasi. Menurut data primer yang peneliti lakukan pada 27 Desember 2017 dan 4 Januari 2018, di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon, program Wadul Bae merupakan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program Wadul Bae juga adalah suatu wadah kepedulian warga akan hak-hak anak yang ada di wilayahnya. Tujuan dari program Wadul Bae ini antara lain untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di tingkat RT RW dan Kelurahan di Kota Cirebon, membantu menyelesaikan masalah, dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Kota Cirebon pada tahun 2018 sedang menjalankan program bergengsi yaitu Smart City, dalam pemberitaan nasional.republika.co.id pada 15 Juni 2017 proyeksi Smart City Kota Cirebon memberitakan terkait Surat Keputusan Kemenkominfo RI No: 265. KOMINFO/DJAI/AI.01.05/05/2017 pada tanggal 5 Mei 2017 tentang Penyampaian Hasil Seleksi

Assement Gerakan Menuju Smart City. Pada surat tersebut, Kota Cirebon menjadi salah satu dari 25 Kota/Kabupaten yang lulus seleksi menjadi peserta Gerakan Menuju 100 Smart City. Uniknya, konsep program Smart City Kota Cirebon ini berbasis kearifan lokal Kota Cirebon, biarpun telah menjadi kota pintar, Kota Cirebon tidak ingin menghilangkan unsur kearifan lokal. Program Wadul Bae menjadi salah satu program unggulan di dalam program Smart City Kota Cirebon, Wadul Bae menjadi salah satu program utama yang di uji coba dalam program Smart City dari empat program utama lainnya yaitu, Cirebon Lengko, Wadul Bae, *Brojol Aja Klalen*, dan *Cirebon Melet* pada akhir tahun 2017.

Program Wadul Bae merupakan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program Wadul Bae juga adalah suatu wadah kepedulian warga akan hak-hak anak yang ada di wilayahnya. Tujuan dari program Wadul Bae ini antara lain untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di tingkat RT RW dan Kelurahan di Kota Cirebon, membantu menyelesaikan masalah, dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cirebon. Wadul Bae merupakan program yang cukup menarik perhatian, pasalnya program Wadul Bae adalah progam yang tidak diberikan anggaran oleh pemerintah. Kader-kader dari program ini adalah orang-orang yang tulus dan ikhlas mengabdikan kepada masyarakat. Khususnya dari program ini adalah dengan adanya program Wadul Bae, korban dan kasus ini dapat terkawal dari awal proses penyembuhan sampai pasca penyembuhan dan tidak ada batasan waktu tertentu.

Ciri khas lain dari program Wadul Bae yang menjadi tolak ukur peneliti untuk meneliti program ini yaitu kekuatan jejaring sosial para kader untuk bisa terus memantau perkembangan kasus. Adapun fakta menarik data sekunder dari Radar Cirebon.com yang menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak (KSA) di Kota Cirebon tergolong tinggi dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati, dari bulan Agustus 2014 hingga Agustus 2015, total ada 77 orang yang ditangani oleh PPT RSUD Gunung Jati akibat kasus kekerasan. Dominasinya adalah kasus kekerasan seksual, baik terhadap perempuan maupun pada anak.

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Cirebon

Tahun	Kasus	Anak	Dewasa
2010	112	62	50
2011	71	36	35
2012	68	33	35
2013	62	32	30
2014	56	41	15
2015	26	21	5

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Cirebon.

Sumber : RadarCirebon.com

Data jumlah kekerasan pada perempuan dan anak pada Tabel 1.1. Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Cirebon menunjukkan bahwa kasus kekerasan korban

yang mendominasi adalah anak-anak dibanding dewasa. Pada catatan lembaga pendamping korban, *Women Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis dalam CNN Indonesia mendapatkan data terkait Kekerasan Seksual Pada Anak (KSA) di Kota Cirebon, bahwa pada empat bulan pertama tahun 2016 sudah berjumlah 30 kasus. Adapula data terbaru yang ditemukan peneliti pada tahun 2017 menurut Manajer Lembaga Aktivis Perempuan *Woman Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis, Sa'adah pada tahun 2016 kemarin ada 88 laporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan seksual pada anak dan pada tahun 2017 dari awal bulan Januari sampai Mei sudah ada 25 laporan yang masuk (newsdetik.com Kamis 18 Mei 2017, 15:22 WIB, diakses pada tanggal 10 September 2019).

Data lain dari Masrokhah, Direktur *Women Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis adalah, Murid SD dan SMP menempati posisi tertinggi sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah III Cirebon. Sedikitnya 42 siswi SD dan 42 siswi SMP di Wilayah III Cirebon menjadi korban kekerasan seksual. Dari 140 kasus yang tercatat di *Women Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis, diterima melalui WCC Mawar Balqis, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Cirebon, dan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) hingga November 2017, sebanyak 85 di antaranya adalah kekerasan seksual yang mana korbannya rata-rata siswi SD dan SMP (Baehaqi Imam Ahmad, *tribunnews.com* Rabu, diakses pada tanggal 12 September 2019).

Terkait data sekunder yang didapat dari beberapa media online, peneliti mendapatkan data KSA yang telah di tangani pihak pemerintah melalui DSPPA Kota Cirebon langsung dari pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon pada tanggal 22 dan 27 Desember 2017 pada saat pra survei yaitu sebagai berikut :

Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Cirebon

Tahun	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
2010	35 kasus
2011	15 kasus
2012	30 kasus
2013	22 kasus
2014	41 kasus
2015	54 kasus
2016	29 kasus
2017	26 kasus
Total Kasus	276 kasus

Tabel 1.2 Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Cirebon dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon.

Dari data pada *Tabel 1.2 Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Cirebon dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon* menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon tiap tahunnya tidak menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dilihat pada tahun 2016 ke tahun 2019, tahun dimana Kota Cirebon mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak, memang angka kekerasan seksual pada anak menurun, akan tetapi tidak menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Anak adalah sebuah aset dan harapan di masa depan, bagaimanapun juga perlunya peranan aktif dan ada penanganan yang cukup dan melindungi untuk tindakan yang sudah marak beredar dari pihak pemerintah dan juga masyarakat, khususnya Kota Cirebon akan terus memantau dan memotivasi korban agar dapat beraktifitas normal, lalu pelayanan terpadu ini tidak ada keterbatasan waktu, hampir 24 jam selalu siap melayani korban dan kasus tanpa bayaran. Para kader Wadul Bae tidak hanya membantu seseorang yang telah menjadi korban, juga mengedukasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga Kota Cirebon. Pernyataan dari Pak Suryadi selaku Ketua dari Program Wadul Bae, mengatakan bahwa semua P2TP2A yang ada di Indonesia rata-rata lemah di jejaring, kurangnya pengurus untuk meneruskan program-program penanganan masalah masyarakat, P2TP2A Kota Cirebon termasuk yang aktif dan mempunyai banyak jejaring.

Penelitian ini berupaya untuk berfokus kepada kepada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam program “Wadul Bae” dalam menekan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cirebon, kemudian menemukan serta menganalisis permasalahan terkait pemenuhan dasar hak anak yang telah dilakukan oleh instansi di wilayah kota Cirebon dalam mengimplementasikan program Kota Layak Anak. Adapun acuan permasalahannya didasarkan pada kluster hak dasar anak yang mengacu pada Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak meliputi : 1). Hak Sipil dan Kebebasan, 2). Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3). Kesehatan dan Kesejahteraan anak 4). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, 5). Perlindungan khusus. Sehingga harapannya, instansi yang terkait dapat menindaklanjuti program guna menyusun skala prioritas dan aturan terkait dengan hak anak, mengintegrasikan program dengan pengarusutamaan hak anak (PUHA) dimasa mendatang agar sinergisitas dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dapat terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Mukhtar (2013: 10) mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Diperkuat dengan pemaparan oleh Sukmadinata (2009:18), bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Sedangkan penelitian

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok, Sukmadinata (2009 : 53-60). Dari pemaparan para ahli dapat disimpulkan bahwa, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan, mendefinisikan, menganalisis suatu peristiwa dan fenomena yang terjadi di Kota Cirebon, yaitu permasalahan yang terkait perlindungan hak dasar anak dan aktivitas sosial di Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui programnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Pada Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Mboke) Dalam Rangka Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2018. Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menekan tingkat kekerasan seksual pada anak tahun 2019 melalui Program Wadul Bae, yang mana dalam sajian pustaka ini akan dibagi ke beberapa klasifikasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang akan di paparkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Riset Selama Dua Tahun Untuk Perencanaan Program Wadul Bae

Kekerasan seksual pada anak adalah sebuah isu dan fenomena yang cukup sensitif di Kota Cirebon, menurut hasil wawancara bersama Ibu Sri Wahyuningsih selaku Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak DSPPPA Kota Cirebon pada tanggal 22 September 2019 sebanyak 85% kasus kekerasan di Kota Cirebon adalah kekerasan seksual pada anak. Perkembangan kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon sudah seperti fenomena gunung es, yang mana semakin lama semakin membesar. Ibu Siti berpendapat bahwa anak adalah objek paling lemah untuk tindakan kekerasan, baik di lingkungan keluarga, rumah, dan sekolah banyak hak-hak anak yang sebenarnya belum terpenuhi.

Perkembangan fenomena kekerasan itu seperti fenomena gunung es gitu ya, istilahnya. Anak itu kan sebenarnya adalah objek yang lemah yah. (sumber : wawancara bersama Ibu Halimah Peksos Kasus Anak, pada tanggal 22 Desember 2017). Pedofil adalah kata-kata yang mengerikan untuk tindakan kekerasan seksual pada anak, pelaku pedofil bisa dihukum kebiri oleh pemerintah sesuai peraturan dalam UU, namun pelaku fenomena kekerasan pada anak saat ini lebih mengesankan dibanding seorang pedofil, yaitu pelakunya adalah anak-anak dan yang menjadi korban juga adalah anak-anak. Fenomena ini banyak terjadi seiring berkembangnya jaman, adanya media baru seperti internet bisa menjadi pemicunya. Dari hasil wawancara bersama Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak, beliau mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar dari anak-anak yang melakukan tindakan tersebut tidak paham jika hal tersebut adalah suatu tindakan asusila yang tidak seharusnya dilakukan, dan ternyata setelah ditelusuri mereka hanyalah meniru “adegan” atau “gambar” dalam “alat pintar mereka” (*gadget*) seperti *handphone* yang mempunyai fasilitas internet tersebut menampilkan gambar-gambar yang seharusnya tidak layak untuk dilihat anak kecil. Kekerasan seksual pada anak unsurnya itu dari arus globalisasi, *social change* atau

perubahan sosial, anak-anak kecil sudah main *gadget*. Ketika tindakan kekerasan seksual korbannya adalah anak, pelakunya adalah anak itu kan sudah luar biasa (sumber : wawancara bersama Sri Wahyuni selaku Peksos Kasus Anak di DSPPPA dan P2TP2A Wadul Bae, pada tanggal 22 November 2019).

Menurut dokter forensik RSUD Gunung Jati, Dr Putu Melati SpF, tindakan kekerasan ini pada umumnya dilakukan oleh orang terdekat, bisa keluarga, guru atau tetangga, orang-orang yang seharusnya melindungi (Radar Cirebon.com, 12 September 2019 19:40 WIB, diakses pada tanggal 27 November 2019). Untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, DSPPPA Kota Cirebon membentuk suatu wadah untuk merancang suatu perencanaan strategi berbentuk program-program sosialisasi, tujuannya untuk mengubah perilaku sosial masyarakat Kota Cirebon. Strategi unggulan dalam penanganan fenomena kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon yaitu adanya bentuk kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam programnya Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Mboke).

Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Cirebon

Tahun	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon	Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon
2010	35 kasus	-
2011	15 kasus	-
2012	30 kasus	-
2013	22 kasus	-
2014	41 kasus	17 kasus
2015	54 kasus	19 kasus
2016	29 kasus	43 kasus
2017	26 kasus	39 kasus
2018	20 kasus	25 Kasus
Total	296 kasus	143 kasus

Tabel 3.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Cirebon. Sumber : Data pribadi DSPPPA dan data pribadi PPT RSUD Gunung Jati.

Dilihat di *tabel 3.1* diatas terlihat bahwa jumlah kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon menurun dari tahun 2016 ke tahun 2018 namun tidak ada penurunan yang signifikan.

Wadul Bae adalah program pemerintah yang didasari oleh penelitian terkait kekerasan di Kota Cirebon, dan dibuatlah perencanaan terkait Program Wadul Bae, setelah melalui proses yang cukup panjang barulah terbentuk program yang telah di SK an oleh Wali Kota Cirebon pada tahun 2005 sampai dengan saat ini.

Dalam memutuskan membuat perencanaan program, Wadul Bae telah melakukan analisis dan pengamatan situasi di lingkungan, agar program yang dijalankan tepat sasaran dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Sebelum Wadul Bae dibuat, Pak Suryadi sebagai ketua pelaksana dan segenap masyarakat Kota Cirebon yang peduli terkait penanganan kasus kekerasan yang marak terjadi di Kota Cirebon menganalisis situasi di lapangan terlebih dahulu. Dalam hasil wawancara, Pak Suryadi dengan yakin mengatakan bahwa dirinya yakin perencanaan Program Wadul Bae akan sukses karena Pak Suryadi dan timnya telah melakukan pengamatan kurang lebih dua tahun lamanya untuk menentukan apakah Program Wadul Bae layak dijalankan atau tidak, awal mulanya memang Pak Suryadi dan tim acuh tak acuh dengan fenomena kekerasan yang kian tahun semakin marak di Kota Cirebon, namun temuan fakta bahwa perempuan dan anak di Kota Cirebon termasuk ke dalam rentan korban kekerasan yang semakin marak di Kota Cirebon pada tahun 2001-2004, tak hanya itu dilihat juga dari masyarakat yang enggan melapor terkait kasus-kasus kekerasan disekitarnya. Ditambah dengan dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah terkait aturan perundang-undangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu bagian dari UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), lalu pihak tim perancang program Wadul Bae semakin yakin untuk gabung dalam program pemerintah karena melihat UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, dan UU No.21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, maka Pemerintah Kota Cirebon diwajibkan membuat suatu upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada anak, maka Pak Suryadi dan tim memberanikan diri untuk merancang Program Wadul Bae yang mana perencanaan program ini mendapat dukungan yang kuat dari banyak kalangan dan banyak pihak, antara lain adalah dukungan dan kerjasama dari pihak Puskesmas Kota Cirebon, dukungan dan kerjasama dari Polresta Cirebon, dukungan dan kerjasama dari FAC (Forum Anak Cirebon), dukungan dari pihak Kejaksaan dan Pengadilan.

Pada saat lima tahun pertama Program Wadul Bae berjalan tanpa bantuan pemerintah pun Wadul Bae mendapat bantuan dana dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Indonesia dalam membuat pelayanan terpadu untuk perlindungan anak, dan bantuan dari *The United Nations Population Fund* (UNFPA) untuk perlindungan perempuan, pada lima tahun pertama di SK kan oleh Pemerintah Kota Cirebon, yaitu 2005-2010, dan pada tahun 2014 yang mana awal mula terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kota Cirebon tepatnya di RSUD Gunung Jati, dukungan dari PPT RSUD Gunung Jati, dukungan dari relawan dokter dan tim medis, dan banyaknya jejaring Wadul Bae yang menjadi penguat.

Adapun kekhawatiran Pak Suryadi dan tim dalam merencanakan Program Wadul Bae. Pada saat merancang program ini, Tim Wadul Bae meyakini bahwa kelemahan utama program ini adalah dana dan anggaran. Melihat hal bahwa dalam program ini Tim Wadul Bae ingin semua

fasilitas dan pelayanan di gratiskan, dan yang melayani pun seperti kader, dokter, psikolog, dan polisi di Wadul Bae tidak dibayar atau digaji, karena ini adalah program layanan sukarela yang mana bukan program wajib Pemerintah Daerah Kota Cirebon, sehingga pemerintah tidak memberikan anggaran kepada Program Wadul Bae. Kurangnya dana pun menjadi kelemahan dalam program ini.

Berhubungan dengan hal tersebut, sebelum membuat Program Wadul Bae, Ketua pelaksana dan tim Wadul Bae telah melihat sisi ancaman dalam perencanaan Program Wadul Bae, yaitu berhubung Program Wadul Bae adalah program layanan yang didirikan oleh masyarakat yang peduli, bukan dari pihak pemerintah langsung, maka ancaman dari keberlangsungan program adalah anggaran yang sangat terbatas karena tidak ada bantuan anggaran dari Pemerintah Kota Cirebon. Juga ditambah dengan sulitnya membina, mengedukasi, mengajak warga untuk berani melapor, bahkan menurut ungkapan dari Pak Suryadi, selaku Ketua Program Wadul Bae mengaku sampai saat ini masih sulit untuk mengajak warga untuk berani melapor.

2. Mengelompokkan Khalayak Sasaran Untuk Sosialisasi Program Wadul Bae

Setelah menganalisis situasi dan kondisi yang ada di lapangan selama kurang lebih dua tahun, Tim Wadul Bae juga mengelompokkan khalayak yang menjadi target sasarannya. Menurut Venus (2012:98) untuk memilih khalayak sasaran sebelum melaksanakan suatu kegiatan dapat dispesifikasikan kedalam beberapa segmen, yaitu :

a. Segmen Geografis

Secara geografis Kota Cirebon termasuk dalam unit kriteria geografis kota dan desa. Daerah yang sering jadi target sasaran Program Wadul Bae adalah semua daerah di Kota Cirebon, karena program ini telah memfasilitasi para kader-kader disetiap kecamatan, kelurahan, bahkan RT dan RW di Kota Cirebon.

b. Segmen Demografis

Program Wadul Bae berfokus kepada pelayanan untuk perempuan dan anak. Perempuan usia berapapun dan anak-anak berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki berusia 0 bulan sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

c. Segmen Psikografi

Segmentasi psikografis untuk pengelompokan beberapa khalayak kedalam beberapa kelompok seperti, kelas sosial, gaya hidup, dan ciri-ciri kepribadian. Untuk mengelompokkan khalayak sasarannya, Program Wadul Bae membagi antara kelas menengah keatas dan kelas menengah kebawah, untuk kelas menengah kebawah yang menjadi sasaran khalayaknya yaitu yang mempunyai anak lebih dari dua anak.

d. Segmen Behavioristik

Segmentasi behavioristik (perilaku) konsumen dibagi ke dalam kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau tanggapan mereka terhadap sebuah produk. Untuk pengelompokan segmen behavioristik Program Wadul Bae mengelompokkan khalayak sasaran yang mana untuk anak-anak adalah anak yang nakal, kurang pendidikan, suka bermain *gadget* dan kurang perhatian dari orangtua.

3. Membuat Tim Kader Wadul Bae

Rancangan tim Kader Wadul Bae terinspirasi dari banyaknya kader-kader kesehatan di tiap-tiap Puskesmas atau relawan lapangan di tiap RT RW dan Kecamatan Kota Cirebon, yang mana para kader kesehatan dan relawan tersebut mempunyai berbagai profesi dikehidupan sehari-hari seperti guru-guru di Kota Cirebon, dokter, polisi, hingga ibu-ibu PKK, pelayanan yang dilakukan oleh para relawan seperti pelayanan kesehatan masyarakat Kota Cirebon. Melihat hal tersebut maka Tim Wadul Bae mulai membentuk kader-kader yang menangani permasalahan sosial di Kota Cirebon, khususnya fenomena kekerasan, baik pada perempuan maupun pada anak.

Menurut hasil wawancara bersama Ketua Pelaksana Program Wadul Bae, Peksos Penanganan Kasus Anak, dan Psikolog, mereka melihat bahwa memang masyarakat Kota Cirebon banyak yang acuh tak acuh dan enggan melapor kasus kekerasan di lingkungannya, namun melihat akrabnya, dekatnya hubungan antar tetangga dengan tetangga yang lain di Kota Cirebon juga menjadi peluang besar adanya Wadul Bae. Wadah pelayanan permasalahan untuk perempuan dan anak di Kota Cirebon pun belum ada sebelumnya, baik dari masyarakat maupun dari Pemerintah Kota Cirebon, ditambah semakin banyak UU yang terkait pelaksanaan pelayanan dan perlindungan untuk perempuan dan anak, Program Wadul Bae menjadi peluang besar untuk wadah perlindungan perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Para Kader Wadul Bae sebelum diterjunkan ke lapangan telah diberikan pelatihan terkait bagaimana mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual pada anak, apa pesan apa yang akan disampaikan pada masyarakat Kota Cirebon, dan cara bagaimana mempersuasi masyarakat Kota Cirebon. Para kader juga diberikan pelatihan dan penyuluhan oleh para pengurus Wadul Bae tentang bagaimana alur pelayanan dalam melayani para korban-korban kekerasan, bagaimana memisahkan pelayanan korban dengan kasus biasa dan luar biasa. Dengan itu pada saat terjun ke lapangan para Kader-kader Wadul Bae bisa mempersuasi dan mengedukasi masyarakat Kota Cirebon terkait bagaimana mengetahui indikasi-indikasi kekerasan, khususnya kekerasan seksual pada anak. Lalu pada saat Wadul Bae berjalan dan cukup diketahui di beberapa kalangan seperti kalangan rumah sakit, perumahan banyak pegawai rumah sakit yang mau ikut menjadi Kader Wadul Bae, dan menariknya laki-laki pun banyak yang tertarik untuk mengatasi dan melindungi persoalan ini.

4. Sosialisasi

Strategi sosialisasi adalah suatu upaya untuk mengenalkan suatu program di lingkungan masyarakat. Dalam merancang sebuah program untuk menentukan sebuah program, nilai yang akan ditentukan dalam sebuah program, tempat kegiatan, cara sosialisasi, bagaimana menjalin kemitraan dengan pihak lain, dan kebijakan seperti apa, yaitu sebagai berikut :

a. Program

Pemerintah Kota Cirebon melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam programnya Wadul Bae, membuat jejaring masyarakat yang dijuluki dengan Kader Wadul Bae, dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada tiap-tiap RT RW dan kecamatan Kota Cirebon dan fasilitas pelayanan Wadul Bae. Produk dalam kegiatan Wadul

Bae adalah kegiatan pelayanan dan sosialisasi yang ada dalam Wadul Bae dan para pengurus program seperti DSPPPA, P2TP2A, PPT RSUD Gunung Jati, kader-kader Wadul Bae, dan juga pihak kemitraan terkait.

b. Nilai

Pemerintah Kota Cirebon melalui P2TP2A melakukan kerjasama dengan Kader-Kader Wadul Bae untuk menyisihkan waktu, usaha, tenaga, dan resiko dalam membantu melayani kasus dan permasalahan sosial kekerasan, terutama kekerasan seksual pada anak. Kebanyakan dari pihak-pihak kepengurusan Wadul Bae adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan lebih dari satu pekerjaan, harga dalam artian disini adalah, usaha, tekad, kemauan, resiko para pengurus, kader-kader, dan para pihak kemitraan.

c. Promosi

Promosi bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk, namun dalam artian di strategi sosialisasi promosi diartikan sebagai suatu upaya untuk mempromosikan bentuk kegiatan, dalam promosi pemasaran sosial Program Wadul Bae menggunakan media cetak maupun elektronik, seperti TV, Radio dan juga koran. Wadul Bae bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika (DKIS) Kota Cirebon dalam mempromosikan melalui media cetak seperti koran.

d. Tempat

P2TP2A Kota Cirebon sebagai Lembaga Pelayanan Terpadu Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah tempat khusus untuk memberikan layanan terpadu pembedayaan perempuan dan anak terhadap kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu Program Wadul Bae yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya atas perempuan dan anak yang bernama Rumah Aman. Strategi tempat dalam program Wadul Bae berkoordinasi bersama pihak dinas terkait, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA), institusi pendidikan di Kota Cirebon, penegak hukum di Kota Cirebon seperti polisi dan pengacara, pihak Polresta Cirebon sendiri memiliki tempat khusus untuk melayani kasus dari Wadul Bae. Organisasi-organisasi yang terlibat lainnya yaitu seperti perkumpulan ibu-ibu PKK, tim medis Kota Cirebon seperti Puskesmas, RSUD Gunung Jati yang menyediakan fasilitas tim medis yang lengkap khusus untuk pelayanan terpadu dan Program Wadul Bae yaitu seperti Dokter Spesialis Bedah, Spesialis Kandungan, Spesialis Jiwa, Spesialis Anak, Dokter Umum, Psikolog, Pekerja Sosial, Bidan dan Perawat.

e. Kemitraan (*partnership*)

Menurut sajian pustaka yang peneliti dapat dari dokumen pribadi P2TP2A yaitu dokumen program kerja Wadul Bae, selain bekerja sama dengan pihak PPT, Polisi, dan dinas-dinas terkait juga bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center dan Baznas yang berada di Kota Cirebon. Namun pada saat peneliti melakukan wawancara bersama pihak lembaga terkait, mereka kurang mengetahui tentang Program Wadul Bae. Pihak Rumah Zakat, Zakat Center dan Baznas Kota Cirebon mengaku bahwa memang mereka melakukan kerjasama kemitraan bersama DSPPPA Kota Cirebon, namun untuk Program Wadul Bae mereka kurang paham terkait kegiatan tersebut. Pada saat peneliti konfirmasi kepada Ketua

Wadul Bae, memang Pak Suryadi sendiri mengaku bahwa hanya mengkomunikasikan kerjasama dengan pihak kepengurusan Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon yang lama, dan kebetulan untuk kepengurusan sekarang semua diganti. Mungkin belum ada koordinasi dari pihak kepengurusan lama dan kepengurusan baru di Rumah Zakat, Zakat Center dan Baznas Kota Cirebon terkait kerjasama kemitraan bersama Program Wadul Bae. Untuk bentuk kerjasamanya sendiri, karena untuk mengajak para Warga Kota Cirebon itu sangatlah tidak mudah, maka pihak Wadul Bae selalu melakukan sosialisasi dengan mengikuti program-program sosialisasi lain agar bisa terus mensosialisasikan program Wadul Bae. Misal, ada sosialisasi tentang KB, kemudian Wadul Bae ikut bergabung dengan kegiatan tersebut lalu, ada sosialisasi santunan kepada anak-anak yatim, Wadul Bae juga ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Cirebon juga bekerjasama dengan LSM *Woman Crisis Center* yang mendukung Pemerintah Kota Cirebon dan juga Forum Anak Kota Cirebon sebagai wadah penanganan dan pencegahan kekerasan anak di Kota Cirebon terutama kekerasan seksual pada anak.

f. Kebijakan (*Policy*)

Peran pemegang kebijakan dalam pelayanan terpadu terkait kekerasan pada perempuan dan anak adalah Pemerintah Kota Cirebon. Program Wadul Bae hanyalah wadah untuk mengembangkan visi pemerintah dalam melayani hak-hak atas perempuan dan anak, terlebih kekerasan seksual pada anak yang harus diatasi dan dicegah. Adapun implementasi hukum nasional yang menjadi landasan utama yaitu, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Masyarakat yang peduli (yang sekarang telah bergabung dengan P2TP2A) terkait permasalahan yang telah menjadi permasalahan sosial tersebut akhirnya membuat program pemasaran sosial didukung oleh Pemerintah Kota Cirebon. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Warga Peduli Bocah Lan Mboke (Wadul Bae) terbentuk dan di beri SK oleh Wali Kota Cirebon pada tahun 2005. Program Wadul Bae semakin yakin untuk berjalan dengan dikuatkan karena adanya dorongan kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut terlihat bahwa pemerintah menganggap bahwa kekerasan seksual pada anak ini penting, sehingga memang dibuat sebuah kebijakan melalui sebuah Undang-undang. Oleh karena itu dibuat implementasi hukum nasional pada tahun 2006 dan 2007, yaitu, UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dan UU No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Selanjutnya regulasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon tidak hanya dengan kebijakan saja, namun regulasi juga harus di implementasikan dalam sebuah program. Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah di atur dalam kebijakan pemerintah, membuat sebuah gerakan yaitu melalui program Wadul Bae, menggandeng Wadul Bae yang mana dulunya adalah sebuah LSM wadah penanganan kasus kekerasan dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Cirebon. Lalu Awal tahun 2018 Pemerintah Kota Cirebon menjadikan Wadul Bae masuk kedalam program Cirebon menuju gerakan 100 Smart City di Indonesia. Wadul Bae menjadi empat program utama

unggulan Smart City yang mana dalam mengimplementasikannya ada aplikasi-aplikasi khusus pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Untuk dana khusus pencegahan dan sosialisasi kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual pada anak Pemerintah Kota Cirebon mengambil 20% dari Anggaran Pengeluaran Belanja Pendidikan Daerah di Kota Cirebon pada tahun 2017.

5. Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Sosialisasi Program Wadul Bae

Program Wadul Bae bekerjasama dengan masyarakat Kota Cirebon yang peduli dan ikhlas membantu keberlangsungan program tersebut, para masyarakat tersebut diberikan julukan yaitu, “Kader Wadul Bae”. Para Kader Wadul Bae, hingga saat ini sudah berjumlah kurang lebih 70 orang, semua kader tersebar di seluruh 5 Kecamatan, 247 RW dan 1.352 RT di Kota Cirebon.

Dengan adanya kader-kader tersebut dapat membantu menjalankan strategi, kader-kader selain membantu melayani korban-korban juga ikut terjun langsung dalam melakukan kegiatan sosialisasi, tujuannya untuk mengedukasi para masyarakat, agar mengetahui ciri-ciri tindakan kekerasan, terutama kekerasan seksual pada anak sampai memproses kasus untuk para korban dan keluarganya. Tujuan dari Program Wadul Bae sebagai berikut :

- a. Menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan anak sejak masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun.
- b. Meningkatkan peran serta warga dalam menciptakan lingkungan protektif dan ramah terhadap anak
- c. Memiliki data basis yang dapat dijadikan bahan rujukan bila terjadi tindak pelanggaran hak-hak anak di Wilayah Kota Cirebon.

Strategi sosialisasi yang dilakukan dalam Program Wadul Bae yaitu dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat Kota Cirebon melalui sosialisasi di tiap-tiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cirebon, yang berjumlah 5 Kecamatan, 22 Kelurahan, 247 RW dan 1.352 RT di Kota Cirebon.

Dalam pelaksanaan program, pengurus Program Wadul Bae juga mengelompokkan beberapa bidang-bidang untuk membantu jalannya proses kasus, tidak hanya itu ada pula bidang khusus sosialisasi dan penyuluhan, tujuan dari adanya bidang sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk menggerakkan strategi komunikasi kepada masyarakat, bidang tersebut bertugas untuk melakukan sosialisasi Hukum dan HAM kepada 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan di Kota Cirebon. Selain kegiatan mensosialisasikan dan mengedukasi pencegahan tindakan kekerasan, adapun pembinaan dan pendampingan untuk anak jalanan melalui kegiatan pelayanan, dan pelatihan pendampingan bagi Kader Wadul Bae. Namun dari hasil wawancara bersama Ketua Pelaksana, beliau mengatakan bahwa mensosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat Kota Cirebon khususnya terkait fenomena kekerasan seksual pada anak, yang mana fenomena tersebut paling banyak terjadi di Kota Cirebon sulit dilakukan. Pasalnya, warga masih beranggapan bahwa itu adalah permasalahan pribadi, dan sebagian menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga. Namun tak habis akal sampai disitu, Wadul Bae mempunyai taktik yang mana adalah sifat dari sosialisasi Wadul Bae yaitu “ngikut”, kegiatan ini cukup unik dalam setiap melakukan sosialisasi Wadul Bae tidak

berjalan sendirian, Wadul Bae selalu bergabung dengan program-program lainnya, seperti kegiatan sosialisasi vaksin anak, nanti ada kader-kader Wadul Bae yang ikut kedalamnya dan disela-sela sosialisasi vaksin tersebut akan diselipkan edukasi terkait mendeteksi tindakan-tindakan kekerasan pada anak. Lalu ada sosialisasi lain terkait KB atau penyakit-penyakit, ataupun kegiatan santunan anak yatim, nanti Wadul Bae akan masuk kedalam dan menyelang beberapa informasi terkait permasalahan kekerasan dan cara pencegahannya.

Maka dari itu Wadul Bae mempunyai Bidang Jejaring dan Kemitraan yang bertugas untuk membuat jejaring dengan beberapa lembaga beberapa diantaranya yaitu Rumah Zakat, Zakat Center, Banzas dan dunia usaha, untuk selalu berhubungan baik dengan pihak kemitraan, agar program Wadul Bae dapat berjalan dengan progres yang positif.

Kita mengadakan tindakan preventif kan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah, kemudian sosialisasi di rumah kepada orangtua tentang bagaimana cara pengawasan orangtua dalam mengawasi anak-anaknya (sumber: wawancara bersama Ibu Halimah selaku Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak di DSPPPA dan P2TP2A Wadul Bae, pada tanggal 22 November 2019).

Adapun kegiatan yang diselenggarakan langsung oleh pihak Wadul Bae menurut Ibu Sрни Piyanti selaku Psikolog PPT dan bidang Advokasi dan Pendampingan Wadul Bae yang berhubungan dengan sosialisasi kepada remaja yaitu berbentuk FGD, kelas parenting, konsultasi gratis, penyuluhan tiap sekolah dan fasilitas satgas kekerasan ditiap sekolah. Pesan-pesan yang disampaikan dalam sosialisasi adalah bagaimana cara untuk mendeteksi indikasi-indikasi kekerasan dilingkungan sekitar, khususnya kekerasan pada anak meliputi kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang marak terjadi.

Namun, sangat disayangkan adalah, semua dokumentasi kegiatan tersebut tidak diarsipkan kedalam dokumentasi kegiatan P2TP2A, semua kegiatan hanya di dokumentasikan oleh pihak penyelenggara resmi kegiatan sosialisasi saja, ataupun ada kader atau kepengurusan Wadul Bae yang mendokumentasikan itu hanyalah menjadi keperluan dokumentasi pribadi masing-masing saja.

Ada juga bentuk lain dari sosialisasi untuk mengedukasi, yang mana saat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mempunyai program *Three Ends* yaitu, akhiri kekerasan terhadap anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Khusus untuk anak dan remaja, adanya strategi lomba gerak dan lagu atau *jingle*, yang mana lagu atau *jingle* tersebut menggunakan bahasa Indonesia pada umumnya. Lirik dari lagu atau *jingle* tersebut diciptakan oleh masing-masing tiap daerah, yang isinya menceritakan dan mengedukasi anak-anak agar berani menghindari indikasi-indikasi kekerasan seksual pada anak. Hal tersebut dibuat karena menyadari bahwa untuk membuat remaja tertarik dan peduli akan isu kekerasan seksual pada anak dan remaja itu harus dengan cara yang menarik, maka dari itu menggandeng Gramedia dan *mall* ternama di Kota Cirebon yaitu CSB Mall, kegiatan tersebut untuk kalangan sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA Negeri maupun Swasta. Kegiatan ini digandeng oleh Perhimpunan Tionghoa Indonesia (PTI) untuk masuk ke sekolah-sekolah.

Program Wadul Bae yang menurut Pak Suryadi memang terlihat mudah, namun pada saat dilaksanakan sangat tidak mudah, yaitu kegiatan “Maghrib Mengaji” yang hanya ada di perkampungan RT 10 Kecamatan Kecapi, Harjamukti, Kota Cirebon. Program “Maghrib Mengaji” dilakukan dengan *door to door*, awalnya banyak warga yang enggan mengikuti dan tidak terima, namun lama-lama banyak warga yang menyadari akan keefektifan program tersebut, dapat mencegah para anak remajanya yang bermain dimalam hari, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kenakalan-kenakalan remaja, dan mengedukasi remaja Kota Cirebon. Untuk semua fasilitas dan pelayanan kemasyarakatan ini, Program Wadul Bae bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga terkait, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati, 22 Puskesmas Kota Cirebon, Polresta Cirebon, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK. Dengan adanya kerjasama itu Wadul Bae mempunyai fasilitas pelayanan berupa psikolog, untuk menangani kasus kekerasan dan konseling, mempunyai dokter-dokter spesialis untuk pengobatan dan perawatan, dan fasilitas hukum untuk pelayanan konsultasi bantuan hukum.

Fasilitas lainnya untuk masyarakat secara general bentuknya sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan pendampingan anak jalanan. Kerjasama antara PPT dan Program Wadul Bae P2TP2A yaitu pembagian tugas hulu ke hilir, yang dimaksud dengan strategi pembagian pelayanan, yang mana untuk fasilitas pelayanan kasus dan korban dikhususnya kepada PPT RSUD Gunung Jati, dan Program Wadul Bae P2TP2A dikhususkan untuk membuat jejaring, yang dinamakan Kader Wadul Bae, untuk membuat strategi ke arah pencegahan, bentuk-bentuk seperti penyuluhan dan sosialisasi untuk mengedukasi para masyarakat, kelas *parenting* (berbasis keluarga), ada juga *Focus Group Discussion* (FGD), konsultasi gratis bagi masyarakat yang mempunyai keluhan atau menerima indikasi-indikasi tindakan kekerasan, dan memfasilitasi satgas kekerasan di setiap sekolah (berbasis sekolah). Tujuannya untuk menekan korban-korban tindakan kekerasan, khususnya kekerasan seksual pada anak-anak.

Jika para kader-kader Wadul Bae membantu dalam hubungan sosial, berbeda dengan PPT yang dikhususnya ke arah medis, ada berbagai macam tenaga profesi seperti pekerja sosial medis yang mendata korban-korban dan kasusnya untuk di proses baik secara medis sampai dengan ke jalur hukum, ada psikolog untuk konseling, spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis jiwa, spesialis anak, dokter umum, bidan, perawat, polisi dan pengacara.

Tujuan lain diadakan Program Wadul Bae yang bekerjasama dengan PPT, dan lembaga-lembaga lainnya, agar para korban dapat “sembuh” dalam artian bisa beraktifitas seperti sebelumnya, dapat ceria kembali, dan tidak ada lagi keluhan-keluhan akibat trauma seperti ngompol, ngigau, menyendiri dan sebagainya. Dari tujuan itu, keluarga juga turut andil mengamati perilaku korban. Jadi peran keluarga juga penting untuk memantau dan mengamati perilaku korban setelah kejadian.

Menurut hasil wawancara bersama Ibu Piyanti selaku Psikolog dan Bidang Advokasi dan Pendampingan Wadul Bae, Beliau mengatakan bahwa sistem pelayanan untuk proses rehabilitasi atau proses medis di PPT berlangsung selama enam bulan, tujuannya untuk mengikis rasa trauma yang itu tidak mudah, setidaknya mereka (korban) dapat berinteraksi secara normal seperti sebelumnya. Proses rehabilitasi yang dilakukan, menyangkut pembinaan sekolah korban pasca

kejadian, karena dalam proses penyembuhan harus menggandeng lingkungan disekitar korban, yang mana salah satunya harus menggandeng sekolah untuk memantau perkembangan korban tersebut setelah kejadian tersebut.

Dalam penelitian ini beberapa kelompok yang diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi dari Syuaib dan Rumondor dalam Ruslan (2003:241) yaitu :

a. Kelompok memberikan bantuan

Klasifikasi ini tertuju untuk Pemerintah Daerah Kota Cirebon, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), karena sesuai dengan klasifikanya yaitu suatu lembaga/institusi yang mengatur terkait perizinan dan berwewenang secara hukum untuk mendistribusikan pemasaran sosial.

b. Kelompok pendukung

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon termasuk dalam klasifikasi pendukung, karena dalam klasifikasi ini menjurus pada partisipan tenaga medis yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

c. Kelompok evaluasi

Untuk klasifikasi kelompok evaluasi yang mana dalam kelompok ini adalah komite legislatif yang memberikan penilaian akhir, apakah program tersebut berpengaruh atau tidak pada masyarakat, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang telah memberikan penghargaan kepada Kota Cirebon melalui DSPPPA terkait Kota Layak Anak tahun 2018.

Dari hasil data temuan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dalam (www.kla.id) yaitu adanya kebijakan untuk pemenuhan hak anak, Penguatan Kelembagaan (Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi aparat dan pendamping, kampanye, sosialisasi, dll), Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan pemenuhan hak-hak terkait anak dan permasalahan yang harus ditindak lanjuti terkait kekerasan pada anak, secara menyeluruh.

Dari penjelasan tersebut, indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak diatas, dapat dilihat bahwa Kota Cirebon telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2017, 2018 dan 2019, yang mana dari 249 Kota/Kabupaten yang menginisiasi sebagai Kota Layak Anak di Indonesia, yang berhasil mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak sesuai dengan indikator hanya 23 Provinsi, 126 Kota/Kabupaten di Indonesia. Dari 27 Kota/Kabupaten Jawa Barat, hanya 15 Kota/Kabupaten yang meraih penghargaan Kota Layak Anak tiga tahun berturut turut dan dari keberhasilan indikator-indikatornya, salah satu peranannya adalah Program Wadul Bae.

Adapun tahapan-tahapan alur penanganan korban-korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak, ada dua tahap yang cukup berbeda, tahap pertama adalah alur dari pelayanan Program Wadul Bae. Pada tahapan pertama korban akan datang, sendiri maupun diantar oleh keluarga atau warga dan RT setempat, lalu bertemu dengan Kader Wadul Bae dan ketua RT/RW maupun Satgas KDRT RW, setelah menceritakan kronologi yang terjadi, korban diantar ke UPT atau Puskesmas, Lurah maupun Satgas KDRT Kelurahan, setelah itu dapat rujukan untuk datang ke PPT untuk penanganan medisnya, dan terakhir akan di rujuk kembali ke P2TP2A, karena di P2TP2A terdapat rumah aman untuk para korban kekerasan baik pada perempuan maupun anak. Sedikit berbeda dengan alur yang pertama, alur kedua berjalan seperti berikut : Dari alur pelayanan yang peneliti dokumentasikan pada *gambar 3.7*, dapat dilihat bahwa korban yang datang ke PPT RSUD Gunung Jati diantar oleh pihak Kader Wadul Bae, lalu di berikan pelayanan langsung seperti ke Instalasi Gawat Darurat untuk registrasi setelah dilakukannya registrasi dapat dilihat korban akan diarahkan kemana, karena adanya tiga jenis korban yaitu non kritis, semi kritis, dan kritis. Non kritis akan langsung diperiksa diruangan PPT, pemeriksaan berupa konseling, tes fisik/*medisco legal* dengan pihak psikolog lalu dilakukan rawat jalan, dengan pengawasan dari pihak P2TP2 Kader Wadul Bae. Semi kritis dibawa ke ruang ICU/HCU untuk rawat inap, dan kritis jika meninggal akan dibawa ke instalasi forensik.

Dari kedua alur tersebut, menurut Pak Suryadi selaku Ketua Program Wadul Bae, alur yang paling efektif untuk masuk kedalam alur-alur pelayanan diatas adalah 5M, yaitu; mendengarkan, mendatangi, mencatat, memperhatikan, membantu, membantu menurut Pak Suryadi tidak harus dengan dana, contoh membantu seperti membantu dalam memecahkan permasalahan, mengantarkan korban ke pihak berwajib, membuatkan proposal dan segala macam.

6. Kegiatan Evaluasi Pada Program Wadul Bae

Bentuk kegiatan evaluasi P2TP2A dalam programnya Wadul Bae dengan membuat jadwal pertemuan sebulan sekali dengan kepengurusan, dan tiga bulan sekali dengan DSPPPA Kota Cirebon dan Kader Wadul Bae untuk kegiatan pertemuan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan pelatihan penanganan korban. Dalam pertemuan tersebut bahan yang menjadi pembahasan adalah membahas terkait isu-isu, fenomena, penyakit yang sedang terjadi di Masyarakat. Selain itu , pertemuan bersama pihak DSPPPA dan Kader Wadul Bae, membahas terkait bagaimana cara menangani warga, membujuk, mengedukasi, dan pembahasan mengenai evaluasi kegiatan-kegiatan Wadul Bae yang telah terjadi di lapangan.

Hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan program Wadul Bae yaitu masyarakat yang berani melapor, dan tolak ukur keberhasilan lainnya adalah dapat melatih, mendidik para Kader Wadul Bae agar mempunyai mental yang kuat, tidak lemah dan dapat meyakinkan warga agar mau melapor. Mental yang kuat harus tertanam dalam diri masing-masing individu yang ikut serta dalam pengembangan Program Wadul Bae, karena pada hasil wawancara bersama ketua pelaksana Wadul Bae mengatakan bahwa, untuk meyakinkan para warga tidak mudah, meyakinkan warga masih dengan cara *door to door* dan untuk meyakinkan satu keluarga harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Warga memang awalnya tidak suka permasalahan keluarganya “diusik” namun,

beberapa cara yang terlihat hasilnya membuat warga semakin terbuka pemikirannya. Harapan dari pelaksanaan evaluasi rutin yaitu agar masyarakat berani untuk melapor dan lebih banyak melapor, dengan melapor dapat mengurangi angka kekerasan seksual khususnya pada anak di Kota Cirebon.

Dengan banyaknya yang melapor itu berarti mengurangi “gunung es” dilapangan. Artinya tidak memandang suatu kalangan, semua kalangan itu harus melapor, karena masyarakat pasti merasakan hasilnya (sumber : wawancara bersama Pak Suryadi selaku Ketua Wadul Bae, pada tanggal 12 Maret 2018).

Harapan kedua agar para kader selalu mempunyai keterampilan dalam meyakinkan warga dalam mengedukasi warga terkait permasalahan sosial ini. Lalu harapan Beliau selanjutnya adalah agar pemerintah dapat lebih memprihatinkan jejaring sosial ini lagi, walaupun kita sudah mengkomunikasi dan bekerjasama dengan semua pihak namun lambat laun sudah jarang berkumpul karena kesibukan masing-masing. Harapannya ingin tetap selalu memperhatikan masyarakat dengan segala kemampuan, baik kemampuan secara material maupun non material.

KESIMPULAN

Dalam menyikapi fenomena kekerasan yang terjadi di Kota Cirebon, yang mana sebanyak 85% dari kasus kekerasan didominasi oleh kekerasan seksual pada anak, dan menyikapi sikap masyarakat yang acuh tak acuh dan enggan untuk melapor, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akhirnya membuat suatu kebijakan dengan membuat wadah pelayanan permasalahan sosial, permasalahan kekerasan pada perempuan dan Anak di Kota Cirebon yaitu dengan menggandeng P2TP2A dalam Programnya Wadul Bae.

Namun pada perencanaan kegiatan Wadul Bae tidak dilakukan secara struktural seperti instrumen analisis paling sederhana yaitu analisis SWOT. Keunggulan dari Wadul Bae, Timnya mengetahui betul apa saja yang akan ada di perencanaan konsep 6P dalam pemasaran sosial, yang mana sangat berbeda dengan pemasaran komersil.

Wadul Bae adalah program pelayanan masyarakat yang berfokus pada pemberian hak-hak atas anak dan memperdayakan perempuan di Kota Cirebon. Nama dari “Wadul Bae” tercipta dari bahasa daerah Kota Cirebon sendiri, yang artinya laporkan saja, selain itu Wadul Bae adalah sebuah singkatan dari kalimat Warga Peduli Bocah Lan Mboke, yang arti dalam Bahasa Indonesia adalah Warga Peduli Anak dan Ibunya. Dalam membuat strategi pemasaran sosial Wadul Bae menggandeng beberapa masyarakat di tiap RT dan RW di Kota Cirebon, juga pihak PPT RSUD Gunung Jati, Polresta Cirebon, Sekolah-sekolah, Puskesmas, dan beberapa lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon untuk bekerja sama dalam mengurangi permasalahan kekerasan baik pada perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Selain fasilitas pelayanan untuk para korban-korban kekerasan, Wadul Bae membuat sosialisasi pencegahan dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan yang bertujuan mengedukasi Warga Kota Cirebon terkait indikasi-indikasi kekerasan, cara pencegahan, dan memotivasi untuk berani melapor tindakan. Namun, warga Kota Cirebon yang terlalu kaku dengan fenomena kekerasan ini selalu enggan untuk diajak dalam kegiatan sosialisasi. Akhirnya, Wadul Bae mempunyai sebuah taktik yang cukup menarik yaitu dengan bergabung kedalam kegiatan-kegiatan sosialisasi lain, yang kadang-kadang topik pembahasannya tidak sama dengan topik pembahasan Wadul Bae. Pada kegiatan gabungan tersebut Wadul Bae bekerjasama dengan beberapa pihak seperti puskesmas. Unikny disini juga Wadul Bae bekerjasama dengan beberapa

lembaga seperti, Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon, namun pihak kemitraan tersebut justru tidak mengetahui apa itu Wadul Bae

Selain itu Wadul Bae juga memegang peranan penting dalam beberapa program pemerintah, yaitu Program *Three (3) Ends* untuk kampanye kekerasan pada anak dengan menggunakan lagu atau *jingle* yang mana liriknya berbahasa Indonesia yang menceritakan dan mengedukasi terkait kekerasan seksual pada anak, dan Program Maghrib Mengaji yang hanya dilakukan di RT 10 Kecapi Kota Cirebon. Sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung berhubungan dengan media, yang mana Wadul Bae bekerjasama dengan pihak media baik cetak maupun elektronik dalam mensosialisasikan isu-isu kekerasan. Media yang sudah diajak bekerjasama pada tahun 2017 yaitu televisi lokal Cirebon dan juga radio nasional.

Selain peran dari pemerintah dan masyarakat, pengawasan dan peran orangtua dalam mendidik anak adalah kunci utama untuk mengurangi tindakan kekerasan seksual pada anak, terutama yang mana pelakunya sekarang banyak terjadi adalah anak-anak itu sendiri. Orangtua harus lebih sadar terhadap apa yang anak lihat dan pergaulan seperti apa yang ada dilingkungan anak-anak.

Dengan semua kegiatan yang cukup menarik tersebut, selalu dilakukan evaluasi kepengurusan setiap satu bulan sekali dan bersama DSPPPA juga para Kader Wadul Bae selama tiga bulan satu kali untuk diadakan evaluasi dan pelatihan penanganan korban. Namun Wadul Bae tidak mempunyai cukup arsip untuk di evaluasi, seperti arsip dokumentasi kegiatan dan data kuantitatif permasalahan. Tim Wadul Bae juga tidak memberikan ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya terkait perkembangan pemasaran sosial program Wadul Bae untuk menangani permasalahan kekerasan yang ada di masyarakat Kota Cirebon.

Dapat disimpulkan bahwa Wadul Bae hanyalah sekedar nama berbasis kearifan lokal saja, namun program-program atau kegiatan di dalamnya tidak melibatkan unsur lokal sama sekali, seperti kegiatan *Three Ends* yang menggunakan nama dari bahasa asing yang mana tidak sesuai dengannama Wadul Bae yang diambil dari bahasa daerah Cirebon, begitupun dengan program lainnya hanyalah program seperti kegiatan pada umumnya, tidak ada aspek kultural sesuai dengan nama program tersebut yang menggunakan bahasa lokal. Selain kurangnya dokumentasi kegiatan, Wadul Bae juga kurang menjalin hubungan dekat dengan pihak kemitraannya, mungkin itu adalah faktor dari kurang meluas dan meratanya kegiatan pemasaran sosial Wadul Bae kepada masyarakat Kota Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreasen R. Alan. 2002. Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace, dalam *Journal Public Policy and Marketing*, Volume 2, No 1 Tahun 2002. United States : EBSCO.
- Anissa Sari E. 2017. *Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Terkait Pencegahan Narkoba Di Kalangan Remaja*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Asyari Yusuf. 2017, Maret 11. Dinas Pendidikan Galakan Program Maghrib Mengaji. Diakses dari <https://www.jawapos.com/> pada tanggal 14 Maret 2018
- Baehaqi Imam Ahmad. 2017, Desember 20. *85 Siswa SD dan SMP di Cirebon Raya Jadi Korban Kekerasan Seksual*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional> pada tanggal 4 Januari 2018.

- Bensley R dan Fisher J. 2009. *Metode Pendidikan Kesehatan Masyarakat* Edisi 2. Jakarta: EGC
- Bessette, Guy. 2004. *Involving the Community : A Guide to Participatory Development Communication*. Penang, Malaysia : Southbound and International Development Research Centre
- Cahyono Sofyan. 2017, Desember, 27. 126 Daerah Raih Penghargaan Kota Layak Anak. diakses dari www.jawapos.com, pada tanggal 15 Maret 2018
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- David R. Fredd. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep* Buku 1, Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat
- Denzin K.N dan Lincoln S. Y. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research (Edisi Ketiga) [The Sage Handbook of Qualitative Research (Third Edition)]*, Cetakan I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Djangkung, Vivick J. 2010. Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Kampung Bebas Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus : Pemberdayaan Masyarakat di Komplek Permata Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat), dalam *Jurnal Komunikasi dan Realitas Sosial*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010. Jakarta : Neliti.com.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Fazri 2017, Maret, 26. *Waspada, Sudah 1.249 Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Jawa Barat*. Diakses dari <https://radarCirebon.com> pada tanggal 17 Desember 2017
- Fazry 2016, Agustus, 31. *RSUD GJ Deklarasi Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan*. Diakses dari <https://radarCirebon.com> pada tanggal 14 Maret 2018
- Hadari Nawawi. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Herimanto, Rumanti & Indrojiono. 2007. *Public Relations Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Santusta
- <http://bp3akb.jabarprov.go.id/tag/three-ends/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018
- <http://pusat.baznas.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018
- <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018
- Kotler, Philip & Nancy Lee. 2007. *Marketing in The Public Sector a Roadmap to Improve Performance*. New Jersey: Pearson Education Inc
- Kotler, Philip dan L. Roberto, Equardo. 1989. *Social Marketing : Strategis for Changing Behaviour*. New York: The Free Press
- Kotler, Philip dan Gary, Amstrong. 1991. *Dasar-Dasar Pemasaran : Jilid 1*. Jakarta: CV Intermedia
- Lanning, B., & Massey-Stokes, M. 2006. Child sexual abuse prevention. Programs in Texas accredited non-public schools. *American Journal of Health Studies*, 21, 36-43. Diakses dari www.biomedsearch.com pada tanggal 11 Januari 2018
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nur Hastuti Tri. 2004. *Komunikasi Pemasaran Sosial Non-Government Organization (NGO) untuk*

- Isu-Isu Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Kasus Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Cut Nyak Dien Yogyakarta dan Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia Surakarta), dalam *jurnal portugal* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2004. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halaman 143-160
- Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi, Konsep, Perencanaan, Strategis Untuk Menghadapi Abad ke 21*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Rangkuti, Freddy. 2009. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Rizal Bomantama (2017, Desember,27). *Kekerasan Seksual Dominasi Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2017*. tribunnews.com/nasional pada tanggal 9 Februari 2018
- Robert E Slavin. 2009. *Cooperative Learning : Teori, Riset dan Praktik*. Bandung : Nusa Media
- Ruslan Rosady. 1998. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ruslan Rosady. 2003. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Rulam Ahmadi. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Silalahi Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial, Cetakan ke satu*. Bandung : PT Refika Aditama
- Smith A.W. 2006. *Social Marketing : An overview of approach and effect*. London, United Kingdom : BMJ Publishing Group
- Tjiptono Fandy. 2000. Strategi Pemasaran Edisi ke 2 Cetakan ke 4. Yogyakarta : Andi
- Unnas. Y. I. 2015, September, 11. Stop Kekerasan Seksual!. Diakses dari <https://radarCirebon.com> pada tanggal 17 Desember 2017
- Utama, Abraham. 2016, Mei, 11. Cirebon Disebut Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com> pada tanggal 9 Desember 2017
- Venus, Antar. 2012. *Manajemen Kampanye : Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung : Simbisosa Rekatama Media
- Wurtele, S.K & Kenny C. M (2010). *Child Sexual Abuse Prevention : Choosing, Implementing and Evaluating a Personal Safety Program for Young Children*. Diunduh dari www.researchgate.net pada tanggal 11 Januari 2018
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance : Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pasa Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendekia
- <https://www.kla.id/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018
- Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group